



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2023-2024
SELASA, 14 MEI 2024**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir menjalankan tugas-tugas konstitusional pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024.

Pada kesempatan ini, atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses, baik di komisi maupun perorangan di daerah pemilihan masing-masing.

Kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh Anggota DPR RI dan hadirin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi kebahagiaan kita semua, dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sanak saudara, dan masyarakat di daerah masing-masing, setelah 1 (*satu*) bulan berpuasa.

DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sehingga perjalanan mudik lebaran tahun ini berjalan lancar, aman dan gembira.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI Periode 2019-2024, memiliki masa sidang tinggal 2 (*dua*) kali persidangan; oleh karena itu, hendaknya kita dapat menuntaskan tugas-tugas konstitusional DPR RI dengan optimal.

Kerja-kerja DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat, pada hakekatnya adalah hendak mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, negara yang berdaulat, dan bangsa yang berkeadaban semakin tinggi.

Dalam melaksanakan kerja konstitusionalnya tersebut, DPR RI dituntut untuk selalu dapat memenuhi harapan rakyat: membentuk Undang Undang yang berkualitas, menyusun Anggaran yang memakmurkan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang memudahkan hidup rakyat, serta memperkuat kedudukan diplomasi politik luar negeri Indonesia.

Kerja konstitusional ini semua membutuhkan kerja bersama seluruh fraksi, untuk dapat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok; setiap fraksi memiliki bintang penuntun dan meja analisis yg berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan politik di DPR RI, sehingga rakyat dapat menilai perilaku

politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional.

Menjadi komitmen kita bersama, untuk selalu menjadikan rakyat dan kepentingan nasional sebagai keutamaan dalam mengambil keputusan-keputusan kerja konstitusional DPR RI.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada Masa Persidangan ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan memasuki tahapan siklus pembahasan APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh Alat Kelengkapan DPR RI akan melakukan pembahasan anggaran belanja di Kementerian/Lembaga untuk APBN Tahun Anggaran 2025.

APBN Tahun 2025, merupakan Tahun Anggaran Pertama bagi Pemerintahan yang Presidennya akan dilantik pada Bulan Oktober 2024 yang akan datang.

Sesuai dengan Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu bahwa Pemerintah dalam menyusun RAPBN harus berbasiskan pada RPJMN yang akan ditetapkan oleh Presiden yang akan dilantik.

Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, dimana APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintahan yang baru.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang disusun oleh Pemerintahan saat ini, hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025. Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 43 (*empat puluh tiga*) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I.

Dalam masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024, maka menjadi komitmen kita bersama pemerintah untuk dapat menuntaskan pembahasan RUU tersebut di atas.

Dalam pembentukan suatu Undang Undang, tentu terdapat berbagai dinamika dan sudut pandang yang berbeda-beda, namun dinamika tersebut dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam UUD NRI 1945; DPR RI bersama Pemerintah juga harus memperhatikan syarat formal pembentukan Undang Undang yang telah menjadi norma dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan Undang-Undang di berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat kemajuan pembangunan.

DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, antara lain:

1. Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024;
2. Kenaikan harga pangan dan sembako;
3. Tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan;
4. Pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil;
5. Ancaman resiko cuaca panas ekstrem;
6. Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) bulan November 2024; dan

7. Tekanan Perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.

Alat Kelengkapan DPR RI yang terkait, harus memberikan atensi khusus pada persiapan dan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan.

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini, merupakan suatu tahapan penting kedepan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang selaras masa pemerintahannya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional antara lain: penyelenggaraan *Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum* pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2024 di Nusa Dua Bali, yang merupakan bagian dari Sidang *The 10th World Water Forum*.

Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses substansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat.

Melalui tema “*Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity*”, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengundang partisipasi seluruh AKD DPR RI untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan *Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum*;

DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi negara sahabat, antara lain delegasi Hongkong, delegasi Turki, dan delegasi Rumania.

Melalui berbagai peran diplomasi, DPR RI ikut berperan dan bertanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis dan berkeadilan sosial.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanir-rahim*, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh

rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2023–2024 akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 14 Mei 2024 sampai dengan Kamis, 11 Juli 2024.

Kepada Anggota Dewan yang Terhormat, kami menyampaikan "SELAMAT BEKERJA MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT" semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Om shanti, shanti, shanti Om

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. (H.C) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

- **Rancangan Undang Undang dalam Pembicaraan Tingkat I:**
1. RUU tentang Daerah Kepulauan;
 2. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
 3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);
 5. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 6. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 7. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 8. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*);
 9. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

10. RUU tentang Desain Industri;
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
12. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Française relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défence*);
13. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*);
14. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*);

15. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*);
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten;
17. RUU tentang Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh;
18. RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh;
19. RUU tentang Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh;
20. RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh;
21. RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh;
22. RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh;
23. RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh;
24. RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh;
25. RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
26. RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
27. RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;
28. RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
29. RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
30. RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;

31. RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara;
32. RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
33. RUU tentang RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara;
34. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
35. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;
36. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
37. RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara;
38. RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;
39. RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
40. RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;
41. RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
42. RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung; dan
43. RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung.

Kegiatan Diplomasi Parlemen:

1. Sidang the Parliamentary Meeting the Occasion of the 10th World Water Forum tanggal 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.
2. Sidang AIPA Caucus tanggal 10 - 13 Juni 2024 di Brunei Darussalam.